

# Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah

<sup>1</sup>Muhammad Doni, <sup>2</sup>Tania Ananda Putri, <sup>3</sup>Tri Bella Juliansia, <sup>4</sup>Ulfa Mawadha, <sup>5</sup>Wangi Pelita Sari, <sup>6</sup>Rama Anina

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

<sup>1</sup> [doniharmonis99@gmail.com](mailto:doniharmonis99@gmail.com), <sup>2</sup> [taniaanandaputri30@gmail.com](mailto:taniaanandaputri30@gmail.com), <sup>3</sup> [tribellajuliansia@gmail.com](mailto:tribellajuliansia@gmail.com),  
<sup>4</sup> [ulfamawadah07@gmail.com](mailto:ulfamawadah07@gmail.com), <sup>5</sup> [wangipelitasari@gmail.com](mailto:wangipelitasari@gmail.com), <sup>6</sup> [ramaanina12@gmail.com](mailto:ramaanina12@gmail.com)

**Abstract :** *The purpose of writing this article is to analyze the Liquidity Risk Management in Islamic Banking. The results show that the liquidity risk of Islamic banks is the same as with other financial services. Liquidity risk is the risk due to the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow resources and/or high quality liquid assets that can be used as collateral, without disruption to the Bank's activities and financial condition. Therefore estimating liquidity requirements is a complex matter. Banks must estimate liquidity needs and find ways to meet all funding needs when needed. The need for bank liquidity comes from two needs. Liquidity risk itself can be interpreted as the risk of a bank's inability to provide immediate liquidity at a reasonable price.*

**Keywords:** *Liquidity Risk, islamic Bank*

**Abstrak :** *Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas bank syariah sama dengan layanan keuangan lainnya. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai jaminan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Oleh karena itu memperkirakan kebutuhan likuiditas adalah hal yang kompleks. Bank harus memperkirakan kebutuhan likuiditas dan menemukan cara untuk memenuhi semua kebutuhan pendanaan pada saat dibutuhkan. Kebutuhan likuiditas bank berasal dari dua kebutuhan. Risiko likuiditas sendiri dapat diartikan sebagai risiko ketidakmampuan bank untuk menyediakan likuiditas segera dengan harga yang wajar.*

**Kata Kunci:** *Risiko Likuiditas, Bank Syariah*

## 1. Pendahuluan

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Jadi risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidak mampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah. Ketidak mampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:

- a. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- b. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima

Resiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko yang paling fundamental dalam industri

perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank Oleh karna itu jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut. Sudah dipastikan bank tersebut akan kehilangan nasabahnya.

Menyatakan likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjam-an, dan memberikan freksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan oprasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Jadi jika suatu bank bisa mengelola likuiditas tersebut, maka nasabah-nasabah akan merasa puas yang akan berdampak pada bertambahnya nasabah baru dan memajukan bank syariah tersebut.(Winanti, 2019)

Risiko likuiditas merupakan pengukuran risiko yang dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposannya dengan aset likuid yang dimilikinya Rose dan Hudgins : 2008 menyatakan bahwa bank menghadapi ancaman risiko likuiditas, yaitu tidak adanya dana yang digunakan untuk menutup penarikan simpanan nasabah dan permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah. Adapun perhitungan yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga. Loan to Deposit Ratio (LDR) banyak digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, semakin tinggi tingkat rasio ini, maka tingkat likuiditasnya akan semakin kecil, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin banyak (Muljono, 1995 dalam Fitrianto, et al 2006).(Adhim, 2018)

Risiko Likuiditas terjadi jika pihak bank tidak mampu dalam menyediakan sumber dana yang liquid untuk memenuhi semua kewajibannya serta ketidaksanggupan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan. Beberapa rasio untuk mengukur risiko likuiditas yaitu: FDR (Financing to Deposit Ratio) , Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaa, IPR ( Investing Policy Ratio) RDI (Rasio Deposan Inti) dan RAPB (Rasio antar Bank Pasiva).(Africa, 2020). Risiko likuditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan kewajiban kepada counter-parties. Komponenoff-balance sheet yang paling signifikan dalam likuidias bank dan pemenuhan pendanaannya adalah komitmen nasabah. Oleh karena itu, bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban financial yang sudah disepakati dengan tepat waktu, dan dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal Besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan beberapa indikator yaitu:

- a. Kecermatan perencanaan arus kas (cash flow) atau arus dana (fund flow) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (volatility of funds).
- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non PLS (profit and loss sharing).
- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
- d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.

Konsep likuiditas menurut Oliver G. Wood, Jr. yang dialih artikan oleh Dahlan Siamat (2005) bahwa suatu bank dianggap likuid apabila bank memenuhi kategori di bawah ini :

- a. Memegang sejumlah alat likuid, cash assets, yang terdiri dari uang kas, rekening pada Bank Sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid akan tetapi bank memiliki surat berharga berkualitas tinggi yang dapat ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat-surat berharga dengan repurchase agreement (repo). (Handayani, 2017)

Menurut (PERMATASARI, 2018) Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mendanai kenaikan aset dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (BCBS, 2000). Oleh karena itu likuiditas sangat penting bagi keberlanjutan usaha bank. Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu di antara kegiatan paling penting yang dilakukan oleh perbankan. Ketidakseimbangan bank dalam pengelolaan aset dan kewajiban dapat menghadapkan bank pada risiko likuiditas.

## 2. Literatur Review

Tantangan Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan. Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi bank dalam pengelolaan risiko likuiditas:

1. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo. Makna tersirat dari definisi ini adalah bahwa kewajiban dapat dipenuhi “pada biaya yang wajar.” Manajemen risiko likuiditas berupaya untuk memastikan kemampuan bank agar dapat terus-menerus memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban arus kas yang tidak pasti, yang tergantung pada peristiwa-peristiwa eksternal dan perilaku agen lainnya.
2. Manajemen risiko yang efektif memperkirakan kebutuhan arus kas masa depan, baik pada kondisi normal maupun kondisi tekanan (stressed condition). Ini menimbulkan sebuah tantangan bagi bank meskipun bank berada pada kondisi pasar yang normal, karena bank membutuhkan kemampuan untuk menarik informasi dari berbagai kegiatan operasi bank dan menilai pengaruh dari peristiwa-peristiwa eksternal terhadap ketersediaan likuiditas pendanaan. Tantangan ini akan meningkat ketika terjadi kondisi tekanan, karena asumsi yang mendasari risiko likuiditas bisa berubah, terutama perubahan perilaku mitra dan kondisi pasar yang dapat memengaruhi likuiditas instrumen keuangan dan ketersediaan pendanaan.
3. Inovasi keuangan dan perkembangan pasar global telah mengubah sifat risiko likuiditas pada tahun-tahun terakhir. Pendanaan beberapa bank telah beralih pada ketergantungan yang lebih besar pada pasar modal, yang merupakan sumber pendanaan lebih fluktuatif daripada pendanaan yang berasal dari simpanan/deposito biasa.

4. Kompleksitas instrumen keuangan juga mengalami peningkatan. Ini menimbulkan kenaikan permintaan atas penjaminan; peningkatan ketidakpastian atas tekanan likuiditas margin call di masa depan; maupun kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan kontraksi pasar aset pada saat kondisi tekanan. Bersamaan dengan perkembangan pasar ini, peningkatan sifat pembayaran dan sistem penyelesaian yang real-time, serta peningkatan interdependensi antarsistem yang berbeda telah meningkatkan pentingnya manajemen likuiditas intrahari.(PERMATASARI, 2018)

#### Prinsip-prinsip dalam Manajemen Risiko Likuiditas

Kerangka manajemen risiko likuiditas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip asesmen manajemen risiko likuiditas dari Basel Committee on Banking Supervision. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip asesmen untuk manajemen risiko bagi institusi perbankan:

1. Mengembangkan sebuah struktur pengelolaan likuiditas. Setiap bank harus memiliki sebuah strategi yang telah disepakati bersama untuk manajemen likuiditas sehari-hari. Dewan direksi dan komisaris bank harus menyetujui strategi dan kebijakan penting terkait dengan manajemen likuiditas tersebut. Dewan tersebut juga harus memastikan bahwa manajemen puncak telah mengambil langkah yang diperlukan untuk memonitor dan mengontrol risiko likuiditas.
2. Mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan. Setiap bank harus membuat sebuah proses untuk pengukuran dan pemantauan yang berkelanjutan atas kebutuhan pendanaan bersih. Selain itu bank harus menganalisis likuiditas yang menggunakan berbagai skenario “seandainya.”
3. Mengelola akses pasar. Secara periodik, bank harus meninjau ulang upayanya untuk membangun dan memelihara hubungannya dengan kreditor, untuk mempertahankan diversifikasi utang, dan memastikan kemampuannya untuk menjual aset.
4. Merencanakan kontingensi. Bank harus memiliki rencana kontingensi yang menunjukkan strategi penanganan krisis likuiditas serta mencakup prosedur-prosedur untuk mengatasi kekurangan kas pada situasi darurat.
5. Manajemen likuiditas valuta asing. Bank harus memiliki sistem pengukuran, pemantauan, dan pengendalian posisi likuiditasnya pada mata uang utama yang aktif.
6. Pengendalian internal untuk manajemen risiko likuiditas. Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai atas proses manajemen risiko likuiditasnya. Komponen dasar sistem pengendalian internalnya antara lain tinjau ulang dan evaluasi independen yang rutin atas efektivitas sistem dan, jika diperlukan, memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan atas pengendalian internal tersebut.
7. Peran pengungkapan publik dalam meningkatkan likuiditas. Bank harus memiliki sebuah mekanisme untuk memastikan terdapatnya tingkat pengungkapan informasi yang memadai mengenai bank tersebut untuk mengelola persepsi publik atas kelembagaan dan kesehatan bank.
8. Peran lembaga pengawas. Pengawas harus melakukan evaluasi independen atas strategi, kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang terkait dengan

manajemen likuiditas. Pengawas mengharuskan bank agar memiliki sistem pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas yang efektif. Pengawas harus memperoleh informasi yang memadai dan tepat waktu dari setiap bank untuk mengevaluasi tingkat risiko likuiditas dan memastikan bahwa bank tersebut memiliki rencana kontingensi likuiditas yang memadai.(PERMATASARI, 2018)

### 3. Hasil

#### **Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/16/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, maka penerapan manajemen risiko likuiditas secara efektif setidaknya mencakup: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, bank perlu mengevaluasi profil risiko likuiditasnya yang dikaitkan dengan kecukupan modal (capital requirement). Efektivitas manajemen risiko likuiditas ini akan meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Secara mendasar, proses pengukuran likuiditas memerlukan empat alat ukur:

1. Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.
2. Rasio likuiditas, yang menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
3. Profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala jangka waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo.
4. Stress testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi krisis.(PERMATASARI, 2018)

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam manajemen risiko, pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko dan barulah dapat dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Oleh karena itu pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, setiap bank Syariah harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang akan dihadapi didalam proses berjalannya bank Syariah tersebut. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana cara manajemen risiko yang akan dihadapi oleh bank Syariah. Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada Bank sebagai salah satu lembaga keuangan.

Penyusunan kerangka kerja, struktur dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) telah dimulai di tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risk event dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya risk event. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama sama dengan yang dihadapi

bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syaria'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risikolain. Seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. (Yulianti, 2009)

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas secara efektif paling kurang mencakup: (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; (iv) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (Pengukuran & Likuiditas, 2009). Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (Bank Indonesia, 2015)

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas juga meliputi:

1. Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas

Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan, selanjutnya pengurus dan pengawas memberikan masukan-masukan kepada manajer tentang apa yang harus dilakukan. Bila dianggap penting, maka pengurus mengeluarkan surat keputusan sebagai pedoman kerja kepada manajer dan karyawan dalam bentuk Peraturan khusus sebagai system pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dalam pengelolaan kas harian di kantor Kepercayaan pengurus dan pengawas kepada manajer sangat tinggi walaupun resiko penyelewengannya juga tinggi. Pemahaman pengurus dan pengawas akan manajemen risiko likuiditas masih rendah terutama di tingkat Pengawas, dengan tidak dilakukannya pengawasan aktif dan on the spot control.

2. Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko Likuiditas

Dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur dan limit likuiditasnya berdasarkan Peraturan Khusus bernomor 003/Persus/BMT-AU/I/2014 tentang Ketentuan Pengelolaan Kas. Peraturan ini berisi Penyediaan Kas, Opname Kas dan Kas Bank.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

1. Identifikasi risiko

Dalam melakukan penghimpunan dana mempunyai produk yang dapat diambil setiap saat dan produk berjangka yang pengambilannya dilakukan sesuai perjanjian dan sesuai karakteristik produknya. Pada dasarnya produk penghimpunan dana didominasi oleh simpanan yang pengambilannya terikat dengan karakteristik produknya.

2. Pengukuran

Pengukuran likuiditas hanya didasarkan pada kebiasaan harian anggota dalam pengambilan tabungannya dan pencairan pembiayaan yang telah disetujui. Bila terjadi kekurangan likuiditas untuk kas, kantor cabang member tahukan kepada kantor pusat untuk menyediakan likuiditasnya dan menunda pencairan pembiayaan yang telah disetujui pencairannya. Alat pengukuran yang lazim dipakai di dunia perbankan yaitu berdasarkan proyeksi arus kas, berdasarkan rasio likuiditas, berdasarkan profil maturitas dan stress testing, sama sekali tidak dikenal oleh manajer dan karyawannya dan tidan menjadi dasar kebijakan oleh pengurusnya.

### 3. Pemantauan

Pemantauan likuiditas telah dilakukan secara harian oleh manajer pusat ke kantor-kantor cabang dengan cara komunikasi intensif melalui telepon, sms dan email. Namun pemantauan untuk mengantisipasi likuiditas dalam jangka panjang tidak dilakukan, bahkan metode pengukurannya seperti early warning indicator yang dikenal di dunia perbankan belum dikenal oleh pengurus, manajer dan karyawan. Sehingga bila dalam jangka panjang terjadi rush ataupun kekurangan likuiditas, belum ada scenario untuk mengantisipasinya.

### 4. Pengendalian

Pengendalian seluruh proses transaksi maupun operasional lainnya langsung ditangani oleh kantor pusat dengan personal 1 orang manager dan 1 orang administrasi keuangan (akunting). Di kantor cabang pengendalian transaksi dan operasional lainnya dilakukan oleh manajer cabang. Bila ada permasalahan maka kantor cabang segera memberitahukan kepada kantor pusat, manajer pusat melakukan rapat dengan pengurus untuk mengambil keputusan. (Anwar, 2015)

## 4. Kesimpulan

### Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dapat membantu meminimumkan atau mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat membuat perusahaan menjadi rugi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor perusahaan untuk tetap mengawasi kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan tersebut kini dapat diawasi dengan mudah karena menggunakan sistem. Sistem merupakan teknologi yang canggih dan sistem tersebut memudahkan perusahaan untuk mengendalikan prosedur yang telah diatur. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga harta kekayaan perusahaan. (Irawati & Satri, 2018)

Menurut Rai (2008: 283) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah. Berdasarkan pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. (Pujiono et al., 2016)

### Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Hall (2007) berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aktiva perusahaan, Aktiva atau harta perusahaan dapat dicuri atau terjadinya penyelewengan sehingga dibutuhkan sistem pengendalian yang memadai.
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, Ketelitian dan keakuratan diperlukan untuk membantu manajemen dalam kegiatan usaha.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, Sistem pengendalian internal mencegah terjadinya pemborosan dan memilah-milah kegiatan bisnis yang tidak diperlukan.
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihakpihak manajemen, Pengendalian internal membantu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan.

### Komponen Pengendalian Internal

Laporan COSO dan AU 319, Condiseration of Internal Control in the Financial Statement Audit (SAS 78) di dalam (Kell, Johnson, & Boynton, 2014) dan juga dikutip oleh (Siwu, 2013) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (control environment) Lingkungan pengendalian (control environment) menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Integrasi dan nilai etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Dewan direksi dan komite audit
  - d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
  - e. Struktur organisasi
  - f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab
  - g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia
2. Penilaian risiko (risk assestment) Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya serta membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus di kelola.
3. Aktivitas pengendalian (control activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian terdiri dari halhal sebagai berikut.
  - a. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai
  - b. Pemisahan tugas
  - c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
  - d. Penjagaan aset dan catatan yang memadai
  - e. Pemeriksaan independen atas kinerja
4. Informasi dan Komunikasi (information and communication) Informasi adalah data yang sudah dikelola yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
5. Pengawasan (monitoring) Pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.



### Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Bastian (2007) tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menjamin administrasi yang efisien, kelengkapan, dan keakuratan pencatatan. Setiap sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan seperti:

1. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi
2. Otoritas dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh pengelola
3. Personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan.

Ciri-ciri sistem pengendalian internal yang baik menurut Bastian (2007)

1. Independen dalam prosedur pemrosesan
2. Harus ada kolusi untuk melewatinya
3. Dilakukan oleh personel dengan senioritas yang memadai
4. Dilakukan secara tepat waktu (Irawati & Satri, 2018)

### Referensi

- Adhim, C. (2018). PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS, EFISIENSI MANAJEMEN TERHADAP PROFITABILITAS MELALUI PERMODALAN. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i1.2323>
- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1171>
- Anwar, A. Z. (2015). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ( Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara ) Universitas Islam Nahdlatul Ulama*. 12(2).
- Bank Indonesia. (2015). Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, 1–43. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Handayani, W. (2017). PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO TINGKAT BUNGA TERHADAP ROA. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v1i2.57>
- Irawati, R., & Satri, A. K. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Di Pt. Unisem Batam. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 183–193. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.609>
- PERMATASARI, I. (2018). Mencegah Gejolak Keuangan dengan Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*. <https://doi.org/10.26740/bisma.v4n2.p145-153>
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Daerah Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 68–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/5956/4417/>
- Winanti, W. (2019). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 81–90. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.34>